KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pinjam Duit Bank Buat Beli Gabah Petani - Bulog Baiknya Pakai APBN
Tanggal : Senin, 06 Mei 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Pinjam Duit Bank Buat Beli Gabah Petani

Bulog Baiknya Pakai APBN

Senayan meminta Perum Bulog tidak lagi membeli beras petani menggunakan dana pinjaman perbankan. Bulog terkendala memaksimalkan serapan berasnya akibat pinjaman berbunga ini.

ANGGOTA Komisi IV DPR KRT Darori Wonodipiro mengatakan, saat ini harga gabah di petani cukup turun signifikan lantaran di banyak daerah memang sedang terjadi panen raya. Musim panen raya ini, Bulog harus bisa maksimalkan beli gabah dari petani.

"Cuma masalahnya, Bulog juga terkendala karena dana yang digunakan itu berasal dari pinjaman dengan bunga komersial. Jadi sama saja, karena Bulog ini kan juga nggak mau rugi," katanya.

Darori mengatakan, pembelian gabah dari petani ini tentu sangat penting, tidak hanya untuk upaya stabilisasi harga di tingkat petani. Tetapi juga meningkatkan kapasitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang-gudang Bulog.

Makanya, dia usul ada kebijakan penganggaran yang mendorong fleksibilitas Bulog dalam memaksimalkan serapan gabah petani.

"Mestinya Bulog diberikan dukungan yang bersumber dari uang negara (APBN), karena kalau pinjaman itu kan pakai bunga komersial," usulnya.

Darori berharap, dukungan anggaran bagi Bulog untuk upaya stabilitas harga dan CBP ini dapat dikaji secepatnya. Sehingga, Bulog benar-benar bisa diandalkan saat harga gabah di petani anjlok.

"Saya kira ini perlu dikaji. Karena kami ini sudah 10 tahun di Komisi IV (DPR), sampai sekarang belum tuntas. Nanti ketemu Mentan (Menteri Pertanian) dan (Kepala) Badan Pangan Nasional dan badan untuk cari jalan keluar bagaimana cara mengatasinya," tambahnya.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi IV DPR Hermanto. Menurutnya, Bapanas perlu menyiapkan strategi kebijakan yang lebih jitu dalam mendorong pengadaan stok beras dalam negeri semaksimal mungkin. Caranya, dengan membeli gabah dan beras petani dan mendorong pengadaan pupuk yang murah bagi petani, tepat waktu serta perbaikan irigasi oleh Pemerintah.

Selain itu, kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di konsumen, juga sedapat mungkin memperhatikan daya beli di masyarakat.

"Sebab kebijakan relaksasi HET beras, secara umum dapat memicu inflasi. Karena itu, sebaiknya HET yang lama dipertahankan," kata Hermanto.

Hermanto kemudian menyinggung relaksasi HET yang belum lama ini dikeluarkan oleh Bapanas untuk beras premium dan medium yang berlaku 10-23 Maret 2024.

HET beras premium yang semula Rp 13.900 per kilogram, menjadi Rp 14.900 per kilogram. Sementara untuk HET beras medium, yang semula Rp 10.900 per kilogram menjadi Rp 12.500 per kilogram. Relaksasi HET beras medium ini berlaku sejak 24 April hingga 31 Mei 2024.

Hermanto mengingatkan, kebijakan relaksasi HET ini tentu berdampak besar pada masyarakat. Apalagi selama ini, konsumen beras premium ini adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

Bila perpanjangan relaksasi HET beras premium dan medium ini dengan maksud memberi margin besar bagi petani, maka hal itu dapat dipahami demi pemerataan pendapatan.

Namun, bila relaksasi HET beras ini terus diperpanjang, maka dapat berdampak pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya sangat besar.

"Itu dapat memperlemah daya beli masyarakat," ucap Hermanto.

Terpisah, Ketua DPD Jawa Barat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Endang Sastraatmadja dapat memahami alasan Pemerintah untuk terus membuka lahan sawah baru terutama di luar Pulau Jawa melalui program cetak sawah. Namun, program cetak sawah ini berada di lahan-lahan yang memiliki air yang cukup.

"Ini penting, karena sawah pasti akan membutuhkan air. Tanpa air, tidak akan ada sawah," katanya.

Dia mengusulkan agar kebijakan pencetakan sawah ini selayaknya dijadikan sebagai gerakan nasional dan gerakan daerah. Sebagai gerakan, harus jelas siapa yang akan membawa 'pedang samurainya'. Sementara di tingkat Pusat, siapa yang akan diberi kehormatan untuk memikul tanggungjawab ini. Begitu pula dengan di daerah. "Pusat dan Daerah perlu bersinergi, sehingga tidak terlihat berjalan sendiri-sendiri," katanya.

Endang mengatakan, dengan semakin membabi-butanya alih fungsi lahan sawah ke non-sawah, pencetakan sawah dianggap sebagai solusi yang penting digarap secara serius. Persoalannya, tentu bukan sekadar mencetak sawah guna menggugurkan kewajiban, tapi pencetakan sawah harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi.

"Program cetak sawah harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional," wantinya. ■ KAL